

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan otonomi daerah, mengetahui dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian daerah Kabupaten Magelang, dan mengetahui persepsi dinas/instansi terhadap ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001-2011. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan beberapa alat analisis rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magelang masih sangat rendah khususnya Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah tanpa adanya pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Kedua, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa dampak yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang, namun belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Ketiga, persepsi dari Dinas/Instansi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 akan membawa dampak meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang namun belum mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah di Kabupaten Magelang. Hal ini karena potensi pajak daerah Kabupaten Magelang masih kurang berpotensi untuk peningkatan pendapatan. Bagi daerah yang mempunyai potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang besar, dimungkinkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kata-kata kunci: kemampuan keuangan daerah, kemandirian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, potensi daerah.